

**BAB II**  
**KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**  
**TAHUN 2012**

**A. URGENSI KERJASAMA MILITER INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

Hubungan antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari sejumlah negara di dunia yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Hal tersebut terjadi karena berbagai perbedaan yang ada di antara kedua negara, antara lain, perbedaan yang terkait dengan sistem politik, kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Namun, fakta geografis yang menunjukkan bahwa kedua negara merupakan negara bertetangga menjadi faktor yang mendorong perlunya kedua negara untuk berinteraksi secara kondusif guna menjaga stabilitas kawasan.

Mengingat bahwa kedua negara menghadapi permasalahan dan tantangan bersama yang mempengaruhi keamanan kedua negara, Indonesia dan Australia perlu melakukan kerja sama dalam bidang keamanan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia telah menandatangani Perjanjian tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (*Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the*

*Framework for Security Cooperation*) pada tanggal 13 November 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perjanjian ini mempunyai arti penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia karena memuat sejumlah prinsip dasar pelaksanaan hubungan bilateral kedua negara. Hal ini juga akan menandai era baru dalam hubungan kedua negara sehingga berbagai permasalahan sensitif dan pelik di antara kedua negara dapat dihadapi dengan suatu landasan yang lebih kuat dan mempunyai tolok ukur yang jelas.<sup>1</sup>

## B. SEJARAH KERJA SAMA PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

Hubungan terpenting kerjasama bilateral Indonesia-Australia ialah bantuan rakyat dan pemerintah Australia di bawah Partai Buruh pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Meski fakta sejarah ini tak perlu dibesarkan, kenangan manis masa revolusi itu tidak akan terlupakan oleh para pemimpin generasi '45, bahkan juga oleh generasi penerusnya. Secara kebetulan Partai Buruh Australia dibawah PM Joseph Benedict Chifley saat itu yang ideologinya antara lain mengagungkan hak-hak politik suatu bangsa untuk memperoleh kemerdekaan (kecuali bangsa Aborigin tentunya) dan sangat anti kolonialisme, saat itu berkuasa di negeri kanguru.<sup>2</sup> Bagi Indonesia, bantuan rakyat dan pemerintah Australia saat itu adalah bantuan yang tulus dari negara tetangga. Namun bila kita

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan\\_australia\\_dengan\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan_australia_dengan_indonesia)

<sup>2</sup> Ikrar Nusa Bakti, Op.Cit hal. 299

mencermati lebih dalam lagi, bantuan Australia saat itu sesuai dengan kepentingan nasional Australia untuk membangun “Kemitraan Strategis” dengan Indonesia pasca kemerdekaan. Ini juga sesuai dengan strategi pertahanan Australia yang jauh ke depan (forward defence strategy) dan persepsi Australia terhadap tetangga-tetangga Asianya, khususnya Indonesia.<sup>3</sup>

Persepsi Australia terhadap Indonesia dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu persepsi psiko-historis, persepsi psiko-kultural, persepsi geografis dan persepsi ekonomi.<sup>4</sup> Dari sisi persepsi historis, Australia yang tumbuh sebagai negara imigran yang dimulai sejak pemukiman narapidana pada Januari 1888, amat peduli dengan perkembangan di negara-negara tetangga utaranya. Sampai dengan awal 1970-an, Australia merasa sebagai bangsa kulit putih yang dikelilingi oleh bangsa kulit berwarna. Dalam kaitan ini, Australia sangat takut dengan bahaya invasi kultural maupun invasi militer dari utara khususnya dari Jepang dan Republik Rakyat China. Kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Asia dibawah pemerintah Liberal-Nasional Country pada saat itu (1950-1972), lebih menonjolkan keikutsertaan Australia di dalam aliansi militer Barat di bawah Amerika Serikat, seperti dalam Pakta ANZUZ (Australia, New Zealand and United States) yang dibentuk tahun 1951 dan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO) yang dibentuk tahun 1954, dan Pakta Pertahanan Lima Negara (Five Powers Defence Arrangement-FPDA) yang

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

dibentuk pada tahun 1971 antara Inggris, Australia, New Zealand, Malaysia dan Singapura untuk membantu Singapura dan Malaysia apabila kedua negara tersebut mendapat ancaman dari luar.<sup>5</sup>

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam bidang pertahanan sudah berlangsung sejak awal tahun 1970. Kerjasama ini pada awalnya lebih banyak dilakukan dalam bidang bantuan alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) dan pelatihan teknis terkait alutsista yang diperuntukan bagi pihak Indonesia. Perlahan kerjasama pertahanan kedua negara ini makin meningkat, terutama pada bidang pelatihan dan pendidikan yang sebagian besar diikuti oleh personel TNI, dan pada tahun 1990 hubungan kerjasama pertahanan kedua negara makin menguat seiring dibahasnya isu-isu ancaman senjata pemusnah massal, keamanan maritim serta penyelundupan.

Diawal tahun 1994 pejabat kedua negara melakukan negosiasi untuk membuat rencana kerjasama pertahanan lebih lanjut. Karena prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, menolak terlibat aliansi militer dengan negara manapun, maka dibuatlah kesepakatan kerjasama pertahanan yang disebut Agreement on Maintaining Security (AMS). Pada tanggal 14 Desember 1995, perjanjian ini disahkan oleh kedua negara. Perjanjian ini berisi prinsip dasar kerjasaman keamanan kedua negara yang menjadi landasan kerjasama pertahanan lebih lanjut.<sup>6</sup> Namun pada tahun 1999 AMS dihentikan, karena jajak pendapat yang diadakan di

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Taylor, tahun. 2007. Hal. 103

Timor Timur (sekarang Timor Leste). Saat itu Australia membatalkan tiga latihan militer bersama dan mengkaji ulang hubungan kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini dilakukan Pemerintah Australia karena jajak pendapat yang terjadi di Timor Timur yang akhirnya berujung pada kerusuhan. Hal tersebut membuat Pemerintah Australia meninjau ulang anggaran kerjasama kedua negara.

Sejak tahun 2001 kerjasama pertahanan keamanan Indonesia dan Australia mulai terbentuk kembali. Secara perlahan kedua negara melakukan pembicaraan di bidang pertahanan. Pembahasan lebih lanjut tentang kerjasama pertahanan ini dilakukan di Forum dialog IADSD. IADSD I dilaksanakan pada tahun 2001 di Bali. Dimana delegasi Indonesia terdiri dari enam pejabat departemen pertahanan dan dipimpin oleh Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, sedangkan delegasi Australia terdiri dari enam pejabat Departemen Pertahan Australia dan dipimpin oleh First Assistant Secretary, Strategic and International Policy. Kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan ini adalah kedua negara sepakat bahwa terdapat isu-isu global dan regional yang berpengaruh pada kepentingan nasional kedua negara yang perlu mendapatkan perhatian serius.<sup>7</sup>

Kedua negara sepakat bahwa memburuknya permasalahan kedua negara banyak dipengaruhi oleh media massa masing-masing negara. Oleh karena itu Indonesia dan Australia sepakat bahwa perbedaan persepsi

---

<sup>7</sup>[http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas\\_hasil\\_dialog\\_ri\\_aus.doc](http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_hasil_dialog_ri_aus.doc) diakses pada tanggal 10/12/2013

perlu dikurangi sampai pada batas minimal agar tidak memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Pada tahun selanjutnya, pembicaraan antar kedua negara terus diupayakan untuk membangun hubungan bilateral yang stabil.

Pada tahun 2004 pertemuan IADSD II dilaksanakan pada tanggal 9-10 Agustus di Yogyakarta. Delegasi Indonesia terdiri dari Direktorat Jendral Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, beberapa pejabat departemen pertahanan dan TNI. Sedangkan delegasi Australia dipimpin oleh Mrs. Myra Rowling, First Assistant Secretary, Strategic and International Policy, Department of Defence, pejabat departemen pertahanan Australia dan angkatan bersenjata Australia serta pejabat kedutaan besar Australia untuk Indonesia. Dalam pertemuan kedua ini, ketua delegasi Australia menyampaikan perlunya peningkatan kerjasama pertahanan antar negara-negara di kawasan. Kerjasama pertahanan yang sudah ada dengan Indonesia diharapkan dapat ditingkatkan. Australia juga mengharapkan forum dialog dengan Indonesia dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pihak Indonesia menyampaikan bahwa untuk forum dialog disaat dibawa ke jenjang yang lebih tinggi memerlukan keputusan politik antar pemimpin kedua negara. Keputusan politik ini dapat dilakukan setelah terpilihnya presiden RI dan terbentuknya kabinet yang baru.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> [http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas\\_hasil\\_dialog\\_ri\\_aus.doc](http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_hasil_dialog_ri_aus.doc) diakses pada tanggal 10/12/2013

Pada tanggal 21-22 November 2005 pertemuan IADSD III dilaksanakan di gedung Old Parlement di Canberra, Australia. Dialog dilaksaakan dengan sistem “co-chair”. Delegasi Indonesia terdiri dari 14 anggota dipimpin oleh Mayjen TNI Dadi Sutanto. Delegasi Australia terdiri dari 14 anggota dipimpin oleh Ms Stephanie Foster. Dalam pertemuan ini kedua negara setuju bahwa kerjasama yang dijalankan tidak dalam bentuk pakta pertahanan. Detail kerjasama pertahanan akan dibahas. Secara lebih rinci oleh masing-masing departemen terkait. Prinsip yang menjadi pedoman kerjasama kedepan adalah kesetaraan, saling menghormati sebagai negara berdaulat dan tidak saling mengintervensi.<sup>9</sup>

Tahun berikutnya pada tanggal 13-14 November 2006 di Aula Nusantara I, Gedung Jendral Urip Sumohardjo di Departemen Pertahanan, dilaksanakan pertemuan IADSD IV. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mayjen TNI Dadi Sutanto dan delegasi Australia dipimpin oleh Ms. Stephanie Foster. Materi yang dibahas dalam dialog ini adalah seputar perkembangan hubungan pertahanan kedua negara yang dilaksanakan oleh TNI dan Australia Defence Force, kerjasama keamanan maritim, kerjasama bidang couter terrorism, peacekeeping serta kerjasama lainnya.<sup>10</sup> Di hari yang sama pada tanggal 13 November 2006 bertempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan Australia meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Hal

---

<sup>9</sup>[http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas\\_hasil\\_dialog\\_ri\\_australia.doc](http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_hasil_dialog_ri_australia.doc) diakses pada tanggal 10/12/2013

<sup>10</sup>[http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas\\_hasil\\_dialog\\_ri\\_australia.doc](http://www.strahan.dephan.go.id/sekilas_hasil_dialog_ri_australia.doc) diakses pada tanggal 10/12/2013

itu ditandai dengan ditandatanganinya Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of Australia on the Framework for Security Cooperation yang disebut juga dengan Perjanjian Lombok.

### C. KONDISI HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA

Kondisi hubungan bilateral Indonesia dan Australia mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Menurut Collin Brown, seorang pakar Indonesia di Australia menyebutkan bahwa hubungan Indonesia dan Australia seperti *roller coaster*. Australia pernah menjadi wakil Indonesia pada Komisi Tiga Negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas pengakuan resmi PBB terhadap Republik Indonesia pada tahun 1949. Hubungan kedua negara kemudian mengalami pasang surut, mulai dari kasus Timor Timur, Papua, *illegal fishing*, terorisme, penyelundupan orang, serta isu-isu perdagangan obat-obatan terlarang dengan seluruh proses hukumnya. Di antara semua itu, kasus Timor Timur dianggap telah menorehkan luka yang begitu mendalam bagi hubungan kedua negara, khususnya Indonesia.<sup>11</sup>

Fluktuasi dalam hubungan bilateral Indonesia dan Australia disebabkan oleh berbagai perbedaan di antara kedua negara, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Rizal Sukma

---

<sup>11</sup> [Http://ikahan.com/2013/06/kasau-indonesia-australia-jajaki-peluang-untuk-memperluas-hubungan-bilateral-kedua-negara/](http://ikahan.com/2013/06/kasau-indonesia-australia-jajaki-peluang-untuk-memperluas-hubungan-bilateral-kedua-negara/)

mengatakan setidaknya adanya tiga isu yang membentuk persepsi publik Australia tentang Indonesia, yakni isu-isu pertahanan dan militer, hak asasi manusia, dan citra Indonesia yang penuh kekerasan. Bagi Indonesia, Australia dianggap penting selain karena peran Australia dalam sejarah kemerdekaan Indonesia juga adanya konektivitas politik, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Indonesia saat ini menjadi penerima program bantuan Australia terbesar tahun anggaran 2009/2010 dengan estimasi mencapai 452.5 juta dolar. Nilai perdagangan barang dan jasa kedua negara mencapai 10.3 miliar dolar dengan nilai investasi dua arah menembus 4.5 miliar dolar. Sementara itu, ada sekitar 400 perusahaan Australia beroperasi di Indonesia yang meliputi sektor pertambangan dan energi, konstruksi, finansial, dan industri makanan.<sup>12</sup>

Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Dalam perjalanannya, hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terlepas dari konflik. Ketika terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, Australia turut campur dengan berpihak kepada Malaysia. Militer Australia yang ketika itu mendukung Malaysia, terlibat pertempuran dengan militer Indonesia di Borneo (Kalimantan). Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Namun, ketika terjadi pemisahan Timor Timur (sekarang Timor Leste) dari Indonesia pada 1999, hubungan

---

<sup>12</sup> [Http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html](http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html)

kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala itu akibat dari turut campur Australia. Saat ini, hubungan kedua negara juga sedikit terganggu akibat dari sikap sebagian kongres Australia yang membiarkan masuknya pelarian dari gerakan organisasi Papua Merdeka (OPM) ke wilayah Australia.<sup>13</sup>

#### D. BENTUK-BENTUK KERJA SAMA PERTAHANAN

Kerjasama merupakan suatu usaha antara suatu negara dengan negara lain atau kelompok negara untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Terjadinya kerja sama di landasi adanya kepentingan yang sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan secara bersama sama melalui suatu mekanisme kerja sama. Dalam melakukan kerja sama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas serta balas jasa yang akan di bawa.<sup>14</sup>

Kerja sama bidang kemiliteran atau bidang keamanan antara Indonesia dengan Australia dihentikan, sejak kemunculan masalah penyadapan Australia terhadap beberapa pejabat tinggi indonesia. rencana latihan bersama Angkatan Laut kedua negara pun dibatalkan. Kerja sama patroli laut oleh kedua negara juga dibatalkan. Indonesia dan Australia kini mengawasi perairan lautnya sendiri-sendiri. Selain di bidang kemiliteran, kerja sama yang dihentikan juga meliputi pertukaran data

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 65

intelijen. Kita stop tukar menukar data dan info intelijen. Kita stop juga latihan bersama Kopassus yang ada di Lembang. Dari Darwin, kita tarik pesawat F16 dan Hercules, katanya. Purnomo menegaskan, penghentian kerja sama itu sama sekali tidak merugikan Indonesia. Sebab, selama ini TNI tak pernah bergantung pada Australia.<sup>15</sup> Dalam kondisi saat ini akan diberikan gambaran tentang kerjasama pertahanan bilateral dan multilateral dalam bentuk operasi, latihan, pendidikan, pengadaan alutsista maupun industri pertahanan.

**a. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Operasi.**

Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain masih relatif terbatas. Sampai saat ini, kerjasama operasi yang terjalin mencakup Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura di Selat Singapura, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi, Patroli Terkoordinasi Indonesia-India di Laut Andaman dan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Australia di Laut Arafuru.<sup>16</sup> Kerjasama operasional yang dilaksanakan oleh Indonesia selama ini lebih banyak terpusat pada negara-negara yang berbatasan langsung dan terfokus pada isu-isu keamanan non tradisional seperti keamanan

---

<sup>15</sup><http://www.jurnalparlemen.com/view/7009/tidak-rugi-indonesia-putusan-kerja-sama-militer-dengan-australia.html>

<sup>16</sup> <http://www.antaraneews.com/print/1144140449/panglima-tni-kerjasama-militer-ri-australia-tetap-baik> diakses pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 WIB.

maritim, penyelundupan manusia dan lain sebagainya. Pada tingkat Angkatan Bersenjata, kerjasama pertahanan multilateral yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia mencakup patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran intelijen dan pemeliharaan perdamaian. Untuk patroli terkoordinasi, sejauh ini yang bersifat multilateral adalah The Malacca Straits Security Patrol. Adapun pertukaran intelijen telah pula dilaksanakan secara multilateral, misalnya pertukaran intelijen keamanan maritim lewat Information Fusion Center di mana Indonesia juga terlibat di dalamnya. Sedangkan kerjasama pemeliharaan perdamaian adalah partisipasi Indonesia dalam beberapa misi pemeliharaan perdamaian PBB, termasuk dalam UNIFIL Maritime Task Force. Dengan adanya kantor PMPP yang berada di Sentul menunjukkan bahwa peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia lewat pasukan PBB dapat diwujudkan baik dalam lingkup kawasan maupun dalam lingkup Internasional. Dalam interaksi tersebut diperlukan kualitas sumber daya manusia pertahanan yang handal dan mumpuni untuk bisa menjalankan koordinasi dan kerjasama dalam operasi bersama yang akan dilaksanakan baik pada kerjasama kawasan Asia Tenggara maupun Internasional.

## **b. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan.**

Indonesia sejak lama telah menggagas dan melaksanakan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata negara-negara lain. Kalau di masa lalu kerjasama latihan bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia lebih diutamakan pada latihan bersama dengan satu negara, sejak beberapa tahun silam Indonesia sudah terlibat aktif dalam latihan bersama beberapa negara. Latihan bersama dilaksanakan oleh ketiga matra TNI dengan mitra masing-masing, misalnya Latma Indosin antara TNI Angkatan Laut dengan Republic of Singapore Navy, Elang Thainesia antara TNI Angkatan Udara dengan Royal Thai Air Force dan Darsasa Malindo antara TNI dengan Tentera Diraja Malaysia. Adapun latihan bersama beberapa negara yang telah diikuti oleh TNI seperti Cobra Gold, Kakadu dan RIMPAC. Latihan rutin antara TNI dengan Australian Defence Force (ADF) pada ketiga matra seperti New Horizon dan Rajawali Ausindo, Latihan CARAT antara TNI AL dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, Latihan Darsasa Malindo antara Indonesia-Malaysia, Passex dan lain sebagainya adalah beberapa latihan antar negara yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan negara-negara mitra.<sup>17</sup>

Dalam kerjasama pertahanan bentuk latihan ini masih ditemukan adanya kesalahan atau kurang pahaman proses perencanaan yang

---

<sup>17</sup> [http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan\\_04.html](http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan_04.html)  
diakses pada tanggal 01 Juli 2012 Pukul 20.00 WIB

di mulai dari Initial Planing Conference sampai pada pelaksanaan latihan, hal ini karena kurang meratanya kemampuan personel dalam berkomunikasi atau berkoordinasi saat pelaksanaan latihan dengan menggunakan bahasa inggris. Disisi lain evaluasi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan latihan masih belum optimal dan hanya sebagai pelengkap latihan.

**c. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pendidikan.**

Dibidang pendidikan, sejak lama Indonesia telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan militer. Dalam kerjasama itu, pada umumnya berlaku asas resiprokal di mana selain TNI mengirimkan perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga pendidikan negara mitra kerjasama, TNI juga menerima perwira siswa dari negara mitra itu guna mengikuti pendidikan militer di lembaga pendidikan TNI. Dewasa ini, sejumlah negara telah menjadi mitra Indonesia dalam kerjasama pendidikan militer, seperti Amerika Serikat, Australia, sebagian negara-negara ASEAN, Cina, India, Korea Selatan dan lain sebagainya. Terkait dengan kerjasama pendidikan itu, beberapa negara memberikan fasilitas pembiayaan khusus kepada Indonesia seperti International Military Education and Training (IMET) yang dibiayai oleh

anggaran pertahanan Amerika Serikat.<sup>18</sup> Sebagaimana kerjasama pertahanan antar negara, pada tingkat internasional terbagi antara tingkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Untuk tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama pertahanan multilateral yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia mencakup ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM), ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus) dan ASEAN Regional Forum (ARF). Baik dalam ADMM, ADMM Plus maupun ARF, selain terdapat forum untuk pertemuan tingkat Menteri dan pejabat senior, juga terdapat sejumlah kelompok kerja (working group) yang membahas isu-isu keamanan seperti keamanan maritim, humanitarian assistance and disaster relief (HADR), counter terrorism, pemeliharaan perdamaian dan lain sebagainya. Dalam kerjasama bentuk pendidikan ini masih ditemukan kemampuan personel pertahanan yang belum dapat berinteraksi dan berkoordinasi dengan baik khususnya pada level bawah. Pada saat selesai pelaksanaan kerjasama pertahanan dalam bentuk pendidikan evaluasi peserta maupun materi pendidikan masih belum dilaksanakan dengan baik.

---

<sup>18</sup> [www.dpr.go.id/.../K1\\_kunjungan\\_Negara\\_Amerika](http://www.dpr.go.id/.../K1_kunjungan_Negara_Amerika) diakses pada tanggal 29 Mei 2012 Pukul 22.00 WIB.

**d. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Pengadaan Alutsista.**

Bentuk kerjasama pertahanan lainnya adalah pengadaan alutsista. Bila di masa lalu Indonesia dalam kerjasama ini lebih banyak sebagai negara penerima, kini Indonesia sudah pula menjadi negara pemberi/pengekspor alutsista. Pengadaan alutsista dewasa ini terjalin dengan Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia dan Pakistan pun sekarang telah menjadi penerima alutsista buatan Indonesia. Dewasa ini Indonesia memiliki kerjasama pertahanan hampir dengan semua negara di kawasan Asia Pasifik. Misalnya dengan Australia yang dipayungi oleh The Lombok Agreement, dengan Amerika Serikat yang mengacu pada Indonesia-United States Comprehensive Partnership dan dengan RRC yang dicakup dalam Indonesia-PRC Strategic Partnership.<sup>19</sup>

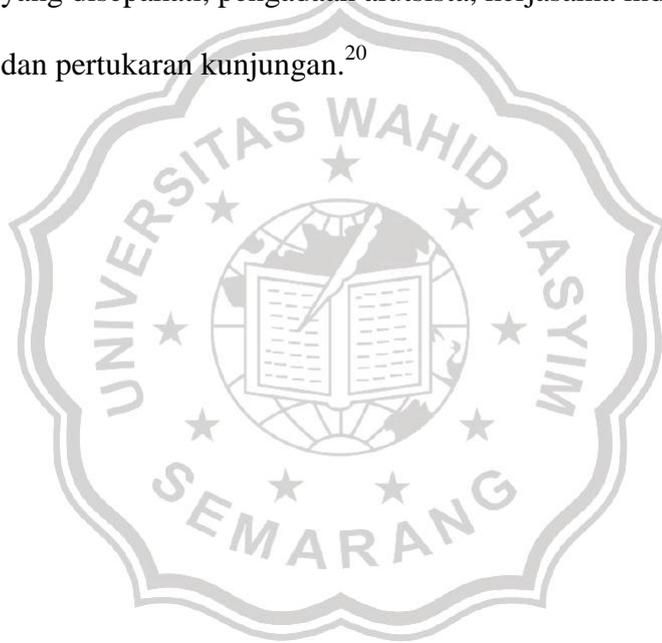
**e. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Industri Pertahanan.**

Indonesia saat ini tengah berupaya untuk membangkitkan kembali industri pertahanan nasional yang mengalami kemunduran akibat krisis ekonomi 1997. Untuk itu, Indonesia terus berupaya menjalin kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara yang sudah lebih dahulu maju di bidang ini, seperti Korea Selatan,

---

<sup>19</sup> <http://www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/News.aspx?IDP=5544&l> diakses pada tanggal 4 Mei 2012 Pukul 17.30 WIB.

Belanda, Australia, India dan lain sebagainya. Namun demikian, kerjasama yang diharapkan akan berkuat pada alih teknologi itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena kendala kebijakan maupun kesiapan teknis industri pertahanan itu sendiri. Pada kerjasama tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama bilateral mencakup dialog pertahanan pada tingkat Menteri dan pejabat senior, kelompok kerja (working group) atas isu tertentu yang disepakati, pengadaan alutsista, kerjasama industri pertahanan dan pertukaran kunjungan.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> [http://indonesiandefense.blogspot.com/2011\\_05\\_15\\_archive.html](http://indonesiandefense.blogspot.com/2011_05_15_archive.html) diakses pada tanggal 01 Juli 2012 pukul 19.30 WIB.